

RENJA 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dinamika perubahan lingkungan, baik nasional maupun global terus terjadi. Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia juga menjadi semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi yang

berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang, seperti demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dari dalam negeri, masalah korupsi, penegakan hukum, sengketa pilkada hingga maraknya penyampaian aspirasi yang berujung anarkis yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri serta yang sangat sensitif akhir-akhir ini adalah pelaksanaan otonomi daerah yang dipandang *kebablasan*. Berbagai masalah tersebut mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah untuk lebih menunjukkan kinerjanya yang nyata sesuai dengan kerangka perencanaan pembangunan nasional yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah telah diatur dan direncanakan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang dan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang teknisnya di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008.

Pembuatan rencana kerja tahunan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan merupakan bagian dari tahapan proses perencanaan pembangunan sebagaimana peraturan perundang-undangan serta dimaksudkan untuk menciptakan arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Daerah sebagai koordinator Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah, serta untuk menciptakan perencanaan yang bersifat berkesinambungan dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Balangan baik yang tertuang dalam RPJP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Balangan.

Rencana Kerja tahunan tersebut merupakan penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja serta targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2,);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka penyusunan rencana kerja ini meliputi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Renja BPKPAD Tahun lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran BPKPAD

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja BPKPAD tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis BPKPAD 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan pada Tahun 2022 telah melaksanakan 4 (Empat) program yang terinci dalam 59 (Lima Puluh Sembilan) kegiatan, yang terdiri dari 21 (dua puluh Satu) kegiatan rutin dan 38 (Tiga Puluh Delapan) kegiatan prioritas. Jumlah Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebesar Rp. 285.104.571.570 dengan rincian pagu untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.149.739.073 terealisasi sebesar Rp. 8.278.681.262 dan pagu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 208.790.146.540

terrealisasi sebesar Rp. 155.026.683.806. Secara umum serapan dana kegiatan pada tahun 2022 cukup optimal karena mencapai 74,25 %.

Tingkat capaian realisasi target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah sampai dengan Tahun 2022 (berjalan) seperti pada tabel berikut :

Tabel. 2.1. Formulir Evaluasi Hasil Renja PD Kabupaten Balangan

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13-12/7x100%		14-6+12		15-14/5x100%		16
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70.4 (BB) Nilai	1.190.669.535.000	70.4 (BB) Nilai	1.147.363.025.300	70.4 (BB) Nilai	14.237.096.190	0 (BB) Nilai	4.652.888.237	0 (BB) Nilai	6.281.659.831	0 (BB) Nilai	1.601.388.533	0 (BB) Nilai	1.601.388.533	0,00	11,25	0 (BB) Nilai	1.601.388.533,00	0,00	0,13					
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.480.300.000	100 %	6.480.300.000	100 %	235.813.650	25 %	21.910.000	50 %	47.490.000	75 %	64.803.000		75 %	64.803.000	75,00	27,48	75 %	64.803.000,00	75,00	1,00				
1.	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	450.400.000	100 %	450.400.000	100 %	23.000.000	25 %	5.700.000	50 %	7.680.000	75 %	4.504.000		75 %	4.504.000	75,00	19,58	75 %	4.504.000,00	75,00	1,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
2.	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu	100 %	4.949.900.000	100 %	4.949.900.000	100 %	147.125.750	25 %	9.870.000	50 %	28.170.000	75 %	49.499.000		75 %	49.499.000	75,00	33,64	75 %	49.499.000,00	75,00	1,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
3.	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	1.080.000.000	100 %	1.080.000.000	100 %	65.687.900	25 %	6.340.000	50 %	11.640.000	75 %	10.800.000		75 %	10.800.000	75,00	16,44	75 %	10.800.000,00	75,00	1,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	75,00	23,22			75,00	1,00						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.065.632.184.000	96 %	1.045.380.671.500	100 %	11.232.301.623	23 %	3.640.350.454	48 %	5.530.497.754	0 %	665.581.186		48 %	665.581.186	48,00	5,93	48 %	665.581.186,00	48,00	0,06				
4.	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	1.059.310.544.000	98 %	1.039.256.211.500	100 %	11.056.282.323	23 %	3.630.080.454	49 %	5.493.987.754	74 %	604.336.586		74 %	604.336.586	74,00	5,47	74 %	604.336.586,00	74,00	0,06	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
5.	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	3.361.040.000	98,7 %	3.163.860.000	100 %	30.993.000	25 %	10.270.000	50 %	12.510.000	75 %	31.638.600		75 %	31.638.600	75,00	102,08	75 %	31.638.600,00	75,00	0,94	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
6.	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	1.896.800.000	100 %	1.896.800.000	100 %	53.254.300	25 %	0	50 %	18.300.000	74 %	18.968.000		74 %	18.968.000	74,00	35,62	74 %	18.968.000,00	74,00	1,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			

7.	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	1.063.800.000	100 %	1.063.800.000	100 %	91.772.000	25 %	0	50 %	5.700.000	75 %	10.638.000		75 %	10.638.000	75,00	11,59	175 %	1.074.438.000,00	175,00	101,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			74,50	38,69		99,50	25,75	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10.618.605.000	100 %	10.618.604.700	100 %	1.624.576.500	25 %	673.736.000	50 %	124.357.047	75 %	728.148.000		75 %	728.148.000	75,00	44,82	75 %	728.148.000,00	75,00	6,86			
8.	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	100 %	2.795.000.000	100 %	2.795.000.000	100 %	62.500.000	15 %	12.902.000	0 %	0	70 %	43.148.000		70 %	43.148.000	70,00	69,04	70 %	43.148.000,00	70,00	1,54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13-12/7x100%		14-6+12		15-14/5x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9.	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	1.923.605.000	100 %	1.923.604.700	100 %	60.436.500	25 %	6.424.000	50 %	14.916.047	70 %	40.000.000		70 %	40.000.000	70,00	66,19	70 %	40.000.000,00	70,00	2,08	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
10.	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	5.900.000.000	100 %	5.900.000.000	100 %	1.501.640.000	20 %	654.410.000	45 %	109.441.000	72 %	645.000.000		72 %	645.000.000	72,00	42,95	72 %	645.000.000,00	72,00	10,93	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			70,67	59,39		70,67	4,85	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	23.026.000.000	100 %	21.923.925.200	100 %	297.398.650	25 %	120.609.850	50 %	189.506.800	75 %	8.945.000		75 %	8.945.000	75,00	3,01	75 %	8.945.000,00	75,00	0,04			
11.	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100 %	875.000.000	100 %	875.000.000	100 %	83.099.500	15 %	9.335.000	45 %	18.085.000	75 %	7.505.000		75 %	7.505.000	75,00	9,03	75 %	7.505.000,00	75,00	0,86	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
12.	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 %	3.279.500.000	80 %	2.229.500.000	100 %	88.350.000	18 %	12.650.000	0 %	0	70 %	0		70 %	12.650.000	70,00	14,32	70 %	12.650.000,00	70,00	0,39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
13.	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan Barang Cetak dan Pengadaan sesuai kebutuhan	100 %	360.000.000	97 %	308.000.000	100 %	10.755.700	25 %	2.480.000	50 %	2.980.000	75 %	0		75 %	2.980.000	75,00	27,71	75 %	2.980.000,00	75,00	0,83	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		

14.	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan	100 %	144.000.000	100 %	144.000.000	100 %	6.999.850	25 %	6.999.850	0 %	0	72 %	1.440.000		72 %	1.440.000	72,00	20,57	72 %	1.440.000,00	72,00	1,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
15.	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	18.367.500.000	100 %	18.367.425.200	100 %	108.193.600	20 %	89.145.000	45 %	168.441.800	70 %	0		70 %	168.441.800	70,00	155,69	70 %	168.441.800,00	70,00	0,92	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		72,40	45,46			72,40	0,80	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32.804.700.000	100 %	27.381.794.400	100 %	473.328.067	25 %	44.741.933	50 %	77.456.830	70 %	133.911.347		70 %	133.911.347	70,00	28,29	70 %	133.911.347,00	70,00	0,41			
16.	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan	100 %	112.500.000	98 %	100.000.000	100 %	1.250.000	25 %	1.000.000	0 %	0	75 %	0		75 %	1.000.000	75,00	80,00	75 %	1.000.000,00	75,00	0,89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
17.	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	24.773.000.000	100 %	23.128.114.400	100 %	334.638.067	25 %	31.091.933	50 %	72.656.830	75 %	133.911.347		75 %	133.911.347	75,00	40,02	75 %	133.911.347,00	75,00	0,54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
18.	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	3.800.000.000	12 Bulan	2.451.000.000	12 Bulan	88.350.000	3 Bulan	12.650.000	0 Bulan	0	9 Bulan	0		9 Bulan	12.650.000	75,00	14,32	9 Bulan	12.650.000,00	75,00	0,33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
19.	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100 %	4.119.200.000	98 %	1.702.680.000	100 %	49.090.000	25 %	0	50 %	4.800.000	72 %	0		72 %	4.800.000	72,00	9,78	72 %	4.800.000,00	72,00	0,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		74,25	36,03			74,25	0,47	
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
							I	II	III	IV																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	52.107.746.000	100 %	35.577.729.500	100 %	373.677.700	25 %	151.540.000	50 %	312.351.400	73 %	0		73 %	312.351.400	73,00	83,59	73 %	312.351.400,00	73,00	0,60			
20.	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 %	27.930.900.000	98 %	13.665.855.000	100 %	118.760.000	25 %	24.300.000	50 %	148.437.400	75 %	0		75 %	148.437.400	75,00	124,99	173 %	13.814.292.400,00	173,00	49,46	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

21.	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Layak Fungsi	100 %	24.176.846.000	98 %	21.911.874.500	100 %	254.917.700	25 %	127.240.000	50 %	163.914.000	70 %	0	70 %	163.914.000	70,00	64,30	168 %	22.075.788.500,00	168,00	91,31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		72,50	94,65			170,50	70,38	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		69,33	32,19			69,33	1,49	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100 %	6.432.720.242.252	98 %	1.141.437.662.100	100 %	205.766.488.995	25 %	23.419.222.406	50 %	1.721.963.388	70 %	61.216.106.788	70 %	61.216.106.788	70,00	29,75	70 %	61.216.106.788,00	70,00	0,95	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	72.389.200.000	100 %	43.050.405.900	100 %	1.343.999.750	25 %	398.243.750	50 %	221.923.940	75 %	278.603.940	75 %	278.603.940	75,00	20,73	75 %	278.603.940,00	75,00	0,38	
22.	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	100 Dokumen	3.362.000.000	80 Dokumen	2.089.970.000	100 Dokumen	141.620.000	25 Dokumen	0	27 Dokumen	10.050.000	18 Dokumen	14.550.000	18 Dokumen	14.550.000	18,00	10,27	98 Dokumen	2.104.520.000,00	98,00	62,60	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
23.	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	100 Dokumen	4.216.000.000	96 Dokumen	2.239.820.000	100 Dokumen	144.770.000	25 Dokumen	0	Dokumen	31.403.540	45 Dokumen	34.403.540	45 Dokumen	34.403.540	45,00	23,76	141 Dokumen	2.274.223.540,00	141,00	53,94	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
24.	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi RKA SKPD dan RKA-PSKPD	48 Unit Kerja	12.824.000.000	45 Unit Kerja	4.649.520.000	48 Unit Kerja	69.350.000	25 Unit Kerja	0	23 Unit Kerja	18.023.000	0 Unit Kerja	0	23 Unit Kerja	18.023.000	47,92	25,99	68 Unit Kerja	4.667.543.000,00	141,67	36,40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
25.	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi DPA SKPD dan DPA-PSKPD	48 Unit Kerja	460.200.000	45 Unit Kerja	120.000.000	48 Unit Kerja	24.860.000	15 Unit Kerja	17.250.000	20 Unit Kerja	19.926.000	33 Unit Kerja	2.676.000	33 Unit Kerja	2.676.000	68,75	10,76	78 Unit Kerja	122.676.000,00	162,50	26,66	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
26.	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	16.666.000.000	2 Dokumen	12.488.410.000	2 Dokumen	323.800.000	2 Dokumen	27.282.000	Dokumen	65.039.400	Dokumen	67.007.400	2 Dokumen	67.007.400	100,00	20,69	4 Dokumen	12.555.417.400,00	200,00	75,34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
27.	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	17.451.000.000	2 Dokumen	11.844.780.000	2 Dokumen	321.119.750	2 Dokumen	321.119.750	Dokumen	0	Dokumen	78.085.000	2 Dokumen	78.085.000	100,00	24,32	4 Dokumen	11.922.865.000,00	200,00	68,32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
28.	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	2 Dokumen	17.410.000.000	2 Dokumen	9.617.905.900	2 Dokumen	318.480.000	2 Dokumen	32.592.000	Dokumen	77.482.000	Dokumen	81.882.000	2 Dokumen	81.882.000	100,00	25,71	4 Dokumen	9.699.787.900,00	200,00	55,71	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		68,52	20,22			163,31	54,14	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Sistem Perbendaharaan Daerah	100 %	64.174.248.000	100 %	29.698.389.300	100 %	1.519.635.000	25 %	337.818.200	50 %	505.828.398	75 %	122.599.598	75 %	122.599.598	75,00	8,07	75 %	122.599.598,00	75,00	0,19	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13-12/7x100%		14-6+12			15-14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
29.	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Kas Daerah Kabupaten Balangan	12 Laporan	28.247.050.000	12 Laporan	10.476.280.000	12 Laporan	170.000.000	3 Laporan	54.351.600	3 Laporan	121.052.100	4 Laporan	0	4 Laporan	121.052.100	33,33	71,21	16 Laporan	10.597.332.100,00	133,33	37,52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
30.	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Monev Dana Transfer ke Kabupaten Balangan	12 Laporan	2.165.000.000	12 Laporan	1.483.400.000	12 Laporan	310.000.000	3 Laporan	62.400.000	2 Laporan	90.667.600	4 Laporan	36.545.600	4 Laporan	36.545.600	33,33	11,79	16 Laporan	1.519.945.600,00	133,33	70,21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
31.	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan	10000 Dokumen	23.833.698.000	9878 Dokumen	12.415.729.300	10000 Dokumen	200.000.000	2500 Dokumen	57.573.000	5000 Dokumen	84.263.000	7000 Dokumen	0	7000 Dokumen	84.263.000	70,00	42,13	16878 Dokumen	12.499.992.300,00	168,78	52,45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
32.	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah regulasi penatausahaan keuangan daerah	1 Dokumen	9.928.500.000	1 Dokumen	5.322.980.000	1 Dokumen	839.635.000	1 Dokumen	163.493.600	1 Dokumen	209.845.698	1 Dokumen	86.053.998	1 Dokumen	86.053.998	100,00	10,25	2 Dokumen	5.409.033.998,00	200,00	54,48	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		59,17	33,84			158,86	53,66			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah			
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100 %	41.847.477.500	100 %	25.271.867.500	100 %	1.065.643.050	25 %	274.044.000	50 %	414.655.050	75 %	210.732.150	75 %	210.732.150	75,00	19,78	75 %	210.732.150,00	75,00	0,50				
33.	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 Dokumen	5.889.937.500	2 Dokumen	3.547.875.000	2 Dokumen	81.846.750	2 Dokumen	24.200.000	Dokumen	52.618.000	Dokumen	45.396.750	2 Dokumen	45.396.750	100,00	55,47	4 Dokumen	3.593.271.750,00	200,00	61,01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
34.	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	5.566.120.000	1 Dokumen	3.737.370.000	1 Dokumen	91.772.000	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	34.241.900	1 Dokumen	34.241.900	100,00	37,31	2 Dokumen	3.771.611.900,00	200,00	67,76	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
35.	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	10.570.000.000	1 Dokumen	8.410.900.000	1 Dokumen	187.945.600	1 Dokumen	9.800.000	Dokumen	47.582.200	Dokumen	72.554.200	1 Dokumen	72.554.200	100,00	38,60	2 Dokumen	8.483.454.200,00	200,00	80,26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
36.	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	7.305.800.000	1 Dokumen	1.909.500.000	1 Dokumen	213.088.200	1 Dokumen	112.640.000	Dokumen	151.825.950	Dokumen	0	1 Dokumen	151.825.950	100,00	71,25	2 Dokumen	2.061.325.950,00	200,00	28,21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		

37.	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	7.578.620.000	1 Dokumen	5.091.300.000	1 Dokumen	366.364.000	1 Dokumen	125.720.000	Dokumen	137.744.000	Dokumen	16.734.000		1 Dokumen	16.734.000	100,00	4,57	2 Dokumen	5.108.034.000,00	200,00	67,40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
38.	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	2 Dokumen	4.937.000.000	2 Dokumen	2.574.922.500	2 Dokumen	124.626.500	2 Dokumen	1.684.000	Dokumen	24.884.900	Dokumen	41.805.300		2 Dokumen	41.805.300	100,00	33,54	4 Dokumen	2.616.727.800,00	200,00	53,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	40,12			200,00	59,61	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan kelancaran penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	6.254.309.316.752	100 %	1.043.416.999.400	100 %	201.837.211.195	25 %	22.409.116.456	50 %	579.556.000	75 %	60.604.171.100		75 %	60.604.171.100	75,00	30,03	75 %	60.604.171.100,00	75,00	0,97			
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7				8				9		10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16		
39.	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tertindakannya bantuan keuangan kepada desa berupa dana DD dan ADD	154 Desa	5.205.677.091.400	154 Desa	1.004.058.499.400	154 Desa	193.497.014.000	154 Desa	21.972.073.316	0 Desa	0 Desa	59.626.551.200		154 Desa	59.626.551.200	100,00	30,82	308 Desa	1.063.685.050.600,00	200,00	20,43	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
40.	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tertindakannya penyediaan dan penanggulangan bencana daerah	1 Tahun	981.054.958.872	1 Tahun	0	1 Tahun	7.000.000.000	1 Tahun	437.043.140	0 Tahun	0	0 Tahun	839.971.500		1 Tahun	839.971.500	100,00	12,00	2 Tahun	839.971.500,00	200,00	0,09	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
41.	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tertindakannya penyusunan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa	154 Desa	67.577.266.480	154 Desa	39.358.500.000	154 Desa	1.340.197.195	154 Desa	0	0 Desa	579.556.000	0 Desa	137.648.400		154 Desa	137.648.400	100,00	10,27	308 Desa	39.496.148.400,00	200,00	58,45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	17,70			200,00	26,32	
																		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		75,00	19,65			75,00	0,51	
																		Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	40 %	55.656.725.000	40 %	49.589.675.000	40 %	2.133.836.500	40 %	361.683.650	40 %	428.062.708	0 %	467.506.376		40 %	467.506.376	100,00	21,91	40 %	467.506.376,00	100,00	0,84		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	40 %	55.656.725.000	40 %	49.589.675.000	40 %	2.133.836.500	40 %	361.683.650	40 %	428.062.708	40 %	467.506.376		40 %	467.506.376	100,00	21,91	40 %	467.506.376,00	100,00	0,84			
42.	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH yang diterbitkan tepat waktu	50 Buku	13.412.185.000	50 Buku	12.746.800.000	50 Buku	120.489.150	50 Buku	117.049.150	0 Buku	125.362.950	0 Buku	0		50 Buku	125.362.950	100,00	104,05	100 Buku	12.872.162.950,00	200,00	95,97	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

43.	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun sesuai kondisi eksisting	31 Dokumen	3.244.370.000	31 Dokumen	2.337.500.000	28 Dokumen	162.821.500	20 Dokumen	2.280.000	26 Dokumen	77.058.764	29 Dokumen	44.115.382		29 Dokumen	44.115.382	103,57	27,09	60 Dokumen	2.381.615.382,00	193,55	73,41	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
44.	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Regulasi dan Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Pemanfaatan & Pemanfaatan BMD	2 Dokumen	3.244.370.000	2 Dokumen	2.337.500.000	2 Dokumen	247.770.000	2 Dokumen	50.161.000	Dokumen	0	Dokumen	0		2 Dokumen	50.161.000	100,00	20,24	4 Dokumen	2.387.661.000,00	200,00	73,59	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
45.	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen terkait inventarisasi barang milik daerah	3 Dokumen	0	Dokumen	0	3 Dokumen	85.075.100	3 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	40.500.000		3 Dokumen	40.500.000	100,00	47,60	3 Dokumen	40.500.000,00	100,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
46.	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tanah yang diajukan pendaftaran sertifikat	50 Persil Tanah	7.120.900.000	50 Persil Tanah	7.120.900.000	50 Persil Tanah	374.644.850	50 Persil Tanah	31.271.000	0 Persil Tanah	0	0 Persil Tanah	80.750.000		50 Persil Tanah	80.750.000	100,00	21,55	100 Persil Tanah	7.201.650.000,00	200,00	101,13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
47.	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan bermotor yang telah membayar pajak	800 Unit	0	0 Unit	0	800 Unit	247.770.000	800 Unit	50.161.000	800 Unit	90.000.000	800 Unit	0		800 Unit	90.000.000	100,00	36,32	800 Unit	90.000.000,00	100,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
48.	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dapat dipindah tangankan	100 Item	28.634.900.000	100 Item	25.046.975.000	100 Item	431.926.650	100 Item	2.495.000	0 Item	60.030.994	0 Item	62.390.994		100 Item	62.390.994	100,00	14,44	200 Item	25.109.365.994,00	200,00	87,69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Proses pemindah tanganan BMD yang sesuai regulasi	10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan		100,00		10,00		100,00			
49.	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD yang disusun sesuai ketentuan	0 Buku	0	0 Buku	0	62 Buku	349.932.750	62 Buku	0	62 Buku	75.610.000	62 Buku	239.750.000		62 Buku	239.750.000	100,00	68,51	62 Buku	239.750.000,00	0,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K			Rp		K
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen rekonsiliasi bulanan aset dan persediaan dengan SKPD	Dokumen		Dokumen		720 Dokumen		720 Dokumen		720 Dokumen		720 Dokumen		720 Dokumen		720 Dokumen		Dokumen		720 Dokumen		100,00		720,00		0,00	
50.	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan BMD	80 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	113.406.500	50 Orang	108.266.500	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	108.266.500	100,00	95,47	50 Orang	108.266.500,00	62,50	0,00					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	100,32	39,57			114,19	39,25							
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	100,00	21,91			100,00	0,84							
Predikat Kinerja (Kegiatan)																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PBB P-2 BPHTB, Persentase Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	100 %	61.580.356.000	100 %	39.931.164.300	100 %	919.422.990	25 %	154.630.859	50 %	351.715.564	70 %	61.754.100		70 %	61.754.100	70,00	6,72	70 %	61.754.100,00	70,00	0,10					
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Lancarnya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	61.580.356.000	100 %	39.931.164.300	100 %	919.422.990	25 %	154.630.859	50 %	351.715.564	72 %	61.754.100		72 %	61.754.100	72,00	6,72	72 %	61.754.100,00	72,00	0,10					
51.	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	11.196.720.000	2 Dokumen	10.634.700.000	2 Dokumen	162.951.390	2 Dokumen	24.963.800	Dokumen	63.748.505	Dokumen	0	2 Dokumen	63.748.505	100,00	39,12	4 Dokumen	10.698.448.505,00	200,00	95,55				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
52.	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah SDM Aparatur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Mengikuti Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	30 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	50.030.600	30 Orang	8.710.000	0 Orang	15.970.000	0 Orang	0	30 Orang	15.970.000	100,00	31,92	30 Orang	15.970.000,00	100,00	0,00				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
53.	5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang didata dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan	1000 Objek Pajak	11.074.260.000	900 Objek Pajak	4.277.844.300	200 Objek Pajak	79.976.500	200 Objek Pajak	14.289.000	400 Objek Pajak	59.127.900	750 Objek Pajak	0	750 Objek Pajak	59.127.900	375,00	73,93	1650 Objek Pajak	4.336.972.200,00	165,00	39,16				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
54.	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Sistem Informasi tentang PBB-P2 dan BPHTB	2 Sistem Informasi	12.397.540.000	2 Sistem Informasi	8.585.700.000	2 Sistem Informasi	194.247.500	2 Sistem Informasi	28.320.000	0 Sistem Informasi	42.920.000	0 Sistem Informasi	0	2 Sistem Informasi	42.920.000	100,00	22,10	4 Sistem Informasi	8.628.620.000,00	200,00	69,60				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		

55.	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang diterbitkan	3000 SPTPD	6.605.051.000	3000 SPTPD	3.957.985.000	800 SPTPD	121.237.000	800 SPTPD	43.894.900	1900 SPTPD	108.335.900	2500 SPTPD	0	2500 SPTPD	108.335.900	312,50	89,36	5500 SPTPD	4.066.320.900,00	183,33	61,56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
			Jumlah SSPD yang diterbitkan	3000 SSPD		3000 SSPD		800 SSPD		800 SSPD		1900 SSPD		2500 SSPD	0 SSPD	2500 SSPD		312,50		2.500,00		83,33						
56.	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Rekap Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Laporan	2.963.870.000	12 Laporan	1.717.040.000	12 Laporan	57.111.900	3 Laporan	15.110.000	3 Laporan	19.340.100	3 Laporan	20.720.100	3 Laporan	20.720.100	25,00	36,28	15 Laporan	1.737.760.100,00	125,00	58,63	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
57.	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah serta Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Penagihan Piutang Pajak Daerah	12 Laporan	5.219.735.000	12 Laporan	3.034.105.000	12 Laporan	117.636.600	3 Laporan	14.088.000	6 Laporan	33.200.000	9 Laporan	41.034.000	9 Laporan	41.034.000	75,00	34,88	21 Laporan	3.075.139.000,00	175,00	58,91	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
58.	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.659.940.000	12 Dokumen	2.687.020.000	12 Dokumen	20.439.100	3 Dokumen	0	6 Dokumen	0	9 Dokumen	0	9 Dokumen	0	75,00	0,00	21 Dokumen	2.687.020.000,00	175,00	73,42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
59.	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	8.463.240.000	4 Dokumen	5.036.770.000	4 Dokumen	115.792.400	1 Dokumen	5.255.159	2 Dokumen	9.073.159	3 Dokumen	0	3 Dokumen	9.073.159	75,00	7,84	7 Dokumen	5.045.843.159,00	175,00	59,62	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Unit Perangkat Daerah Penganggung Jawab													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)											155,00	33,54			149,83	51,65								
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah								
				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)											72,00	6,72			72,00	0,10								
				Predikat Kinerja (Kegiatan)											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
				Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)											60,00	17,41			60,00	0,51								
				Predikat Kinerja (Program)											Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah								
				Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)											89,77	28,40			138,44	38,06								
				Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)											Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
				Jumlah Anggaran dari seluruh Program											223.056.844.675		28.588.425.152		8.783.401.491		63.346.755.797			63.346.755.797				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																												

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
5. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan yang disajikan melalui tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	3	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	87	87	87	88	89	90	90
	Indeks Pengelolaan Aset	38,91	40	42	45	48	52	52

	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	6	6	7	7	8	8
	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan	8	8	8	9	9	10	10
2	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Perkembangan regulasi dan kebijakan terhadap pengelolaan keuangan yang menyangkut dengan pengelolaan aset negara menyebabkan daerah harus menindaklanjutinya dengan melakukan terhadap Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Kerja Pemerintahan di daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan tersebut, terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Adapun tugas pokok Badan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD). Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
- b. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.
- c. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembiayaan.
- d. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian akuntansi.
- e. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah.
- f. Pemberian perijinan dan pelayanan umum.
- g. Pengelolaan unit pelaksana teknis.

h. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. *Weaknes* (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. *Opportunity* (Peluang)

- 1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Balangan.

- 2) Adanya diklat, seminar, bimtek, workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. *Treath* (Ancaman)

- 1). Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2). Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
- 3). Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
- 4). Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 5). Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
- 6). Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis akrual;
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi;
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Pengembangan pengelolaan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah;
6. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang;
7. Pelayanan prima;
8. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesuai tuntutan kebutuhan;

Berdasarkan isu-isu penting tersebut di atas, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan terutama dalam hal SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung.

➤ ***Sumber Daya Manusia Aparatur***

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

➤ ***Sarana dan Prasarana***

1. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang lebih baik dalam menunjang pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Rancangan awal RKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah sampai tahun 2022 terkait

dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Adapun Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi Renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Balangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPAD	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	B	21.299.649.011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPAD	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	B	21.299.649.011	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	239.682.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	239.682.400	

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPAD	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	51.349.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPAD	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	51.349.700	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPAD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu	100%	115.080.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPAD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu	100%	115.080.100	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Persentase ketersediaan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	73.252.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Persentase ketersediaan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	73.252.600	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	14.388.297.642	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPAD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	14.388.297.642	

			Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku					Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPAD	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	13.738.181.342	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPAD	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	13.738.181.342	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPAD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	130.985.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPAD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	130.985.800	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPAD	Persentase Laporan Keuangan Akhir sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	65.125.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPAD	Persentase Laporan Keuangan Akhir sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	65.125.500	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	BPKPAD	Persentase Laporan Keuangan	100%	454.005.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	BPKPAD	Persentase Laporan Keuangan	100%	454.005.000	

	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan			Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan			
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPAD	Cakupan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.574.175.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPAD	Cakupan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.574.175.200	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPAD	Persentase pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	100%	133.863.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPAD	Persentase pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	100%	133.863.000	
1.3.2	Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan	BKPAD	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	67.312.200	Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan	BKPAD	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	67.312.200	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPAD	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi	100%	2.373.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPAD	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi	100%	2.373.000.000	

			Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangan			
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPAD	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	859.717.809	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPAD	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	859.717.809	
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKPAD	Persentase ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100%	92.934.100	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKPAD	Persentase ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100%	92.934.100	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPAD	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	427,917,909	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPAD	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	427,917,909	
1.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKPAD	Persentase ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100%	15.490.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKPAD	Persentase ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100%	15.490.800	

1.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKPAD	Persentase ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan	100%	31.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKPAD	Persentase ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan	100%	31.500.000	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPAD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	292.415.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPAD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	292.415.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPAD	Waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	896.689.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPAD	Waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	896.689.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPAD	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	329.768.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPAD	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	329.768.000	
1.5.3	Penyediaan jasa peralatan dan	BPKPAD	Waktu Penyediaan Jasa	12 bulan	137.921.000	Penyediaan jasa peralatan dan	BPKPAD	Waktu Penyediaan Jasa	12 bulan	137.921.000	

	perlengkapan kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor			perlengkapan kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPAD	Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100%	429.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPAD	Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100%	429.000.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPAD	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.051.376.960	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPAD	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.051.376.960	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPAD	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	369.196.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPAD	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	369.196.900	
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	BKPAD	Persentase Sarana dan Prasarana	100%	669.440.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	BKPAD	Persentase Sarana dan Prasarana	100%	669.440.00	

	Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung kantor layak fungsi			Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung kantor layak fungsi			
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	87%	221.942.195.033	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	87%	221.942.195.033	
2.1	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPAD	Persentase Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	100%	1.926.431.200	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPAD	Persentase Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	100%	1.926.431.200	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPAD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	146.020.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPAD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	146.020.000	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	144.770.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	144.770.000	
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPAD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan	48 unit kerja	534,733,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPAD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan	48 unit kerja	534,733,000	

			dan review/asistensi RKA SKPD dan RKA-P SKPD					review/asistensi RKA SKPD dan RKA-P SKPD			
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPAD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi DPA SKPD dan DPA-P SKPD	48 unit kerja	36.860.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPAD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi DPA SKPD dan DPA-P SKPD	48 unit kerja	36.860.000	
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	323.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	323.800.000	
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	BPKPAD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen	321.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	BPKPAD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	321.120.000	

	Perubahan APBD		tentang Perubahan Penjabaran APBD			Penjabaran Perubahan APBD		Perubahan Penjabaran APBD			
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPAD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	2 Dokumen	419.128.200	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPAD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	2 Dokumen	419.128.200	
2.2	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPAD	% SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan	100%	2.716.429.800	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPAD	% SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan	100%	2.716.429.800	
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD	Jumlah Laporan Kas Daerah Kabupaten Balangan	12 Dokumen	482.036.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD	Jumlah Laporan Kas Daerah Kabupaten Balangan	12 Dokumen	482.036.000	
2.2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	BPKPAD	Jumlah Laporan Monev Dana Transfer ke Kabupaten Balangan	12 Dokumen	54.382.400	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	BPKPAD	Jumlah Laporan Monev Dana Transfer ke Kabupaten Balangan	12 Dokumen	54.382.400	

	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
2.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPAD	Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan	10.000 Dokumen	392.417.500	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPAD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	10.000 Dokumen	392.417.500	
2.2.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPAD	Jumlah regulasi penatausahaan keuangan daerah	1 Dokumen	194.775.700	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPAD	Jumlah regulasi penatausahaan keuangan daerah	1 Dokumen	194.775.700	
2.3	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	BPKPAD	% Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu	100%	2.010.347.300	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	BPKPAD	% SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan	100%	2.010.347.300	

	Keuangan Daerah					Keuangan Daerah		tepat waktu, % Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu			
2.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPAD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	2 Dokumen	134.900.900	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPAD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	2 Dokumen	134.900.900	
2.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	105.033.100	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	105.033.100	

2.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPAD	Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	237.353.700	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPAD	Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	237.353.700	
2.3.4	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	271.049.400	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	271.049.400	
2.3.6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	2 Dokumen	927.164.300	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	2 Dokumen	927.164.300	

3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPAD	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	40	2.243.230.400	PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	BPKPAD	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	40	2.243.230.400	
3.1	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	1. Persentase aset tanah yang bersertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat 2. Persentase pemindah tanganan BMD yang selesai dilaksanakan 3. Persentase penyelesaian LBMD tahunan 4. Persentase RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting	1. 6,44 % 2. 100% 3. 100% 4. 100%	2.243.230.400	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	1. Persentase aset tanah yang bersertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat 2. Persentase pemindah tanganan BMD yang selesai dilaksanakan 3. Persentase penyelesaian LBMD tahunan 4. Persentase RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting	1. 6,44 % 2. 100% 3. 100% 4. 100%	2.243.230.400	

3.1.1	penyusunan standar harga	BPKPAD	Jumlah Dokumen SSH yang diterbitkan tepat waktu	50 buku SSH 2024	238.774.800	penyusunan standar harga	BPKPAD	Jumlah Dokumen SSH yang diterbitkan tepat waktu	50 buku SSH 2024	238.774.800	
3.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun sesuai kondisi eksisting	31 Dokumen RKBMD	102,931,400	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun sesuai kondisi eksisting	31 Dokumen RKBMD	102,931,400	
3.1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah dokumen Regulasi dan Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Penatausahaan & Pemanfaatan BMD	2 Dokumen	139.136.1200	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah dokumen Regulasi dan Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Penatausahaan & Pemanfaatan BMD	2 Dokumen	139.136.1200	
3.1.4	Inventarisasi Barang Milik	BPKPAD	Jumlah Dokumen terkait inventarisasi barang milik daerah	3 Dokumen	108.460.100	Inventarisasi Barang Milik	BPKPAD	Jumlah Dokumen terkait inventarisasi barang milik daerah	3 Dokumen	108.460.100	

3.1.5	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah aset tanah yang diajukan pendaftaran sertifikat	50 Persil Tanah	386.150.500	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah aset tanah yang diajukan pendaftaran sertifikat	50 Persil Tanah	386.150.500	
3.1.6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah kendaraan bermotor yang telah membayar pajak	800 kendaraan bermotor	49.641.500	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah kendaraan bermotor yang telah membayar pajak	800 kendaraan bermotor	49.641.500	

3.1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPAD	1. Jumlah Proses pemindah tanganan BMD yang sesuai regulasi 2. Jumlah BMD yang dapat dipindah tangankan	1. 10 Kegiatan 2. 100 item	265.458.200	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPAD	1. Jumlah Proses pemindah tanganan BMD yang sesuai regulasi 2. Jumlah BMD yang dapat dipindah tangankan	1. 10 Kegiatan 2. 100 item	265.458.200
3.1.8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPAD	1. Jumlah Dokumen LBMD yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah Dokumen rekonsiliasi bulanan aset dan persediaan dengan SKPD	1. 62 buku 2. 720 dokumen	756.966.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPAD	1. Jumlah Dokumen LBMD yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah Dokumen rekonsiliasi bulanan aset dan persediaan dengan SKPD	1. 62 buku 2. 720 dokumen	756.966.000

3.1.9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan BMD	80 orang	95.811.700	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan BMD	80 orang	95.811.700	
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPAD	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	100%	2.311.126.000	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPAD	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB - P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	100%	2.311.126.000	
4.1	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	BPKPAD	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah	100%	2.311.126.000	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	BPKPAD	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah	100%	2.311.126.000	
4.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	288.761.800	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	288.761.800	
4.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah SDM Aparatur Pengelolaan Pajak dan	30 Orang	225.381.800	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah SDM Aparatur Pengelolaan Pajak dan	30 Orang	225.381.800	

			Retribusi Daerah yang Mengikuti Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah					Retribusi Daerah yang Mengikuti Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah			
4.1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPAD	jumlah objek pajak yang didata dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan	1000 Objek Pajak	285.280.500	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPAD	jumlah objek pajak yang didata dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan	1000 Objek Pajak	285.280.500	
4.1.4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPAD	Jumlah sistem informasi tentang PBB-P2 dan BPHTB	2 sistem informasi	214.859.900	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPAD	Jumlah sistem informasi tentang PBB-P2 dan BPHTB	2 sistem informasi	214.859.900	
4.1.4	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah SPTPD dan SSPD yang diterbitkan	3000 SPTPD dan 3000 SSPD	402.976.400	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah SPTPD dan SSPD yang diterbitkan	3000 SPTPD dan 3000 SSPD	402.976.400	
4.1.5	Penelitian dan Verifikasi Data	BPKPAD	Jumlah Rekap Laporan	12 Laporan	91.327.000	Penelitian dan Verifikasi Data	BPKPAD	Jumlah Rekap Laporan	12 Laporan	91.327.000	

	Pelaporan Pajak Daerah		Penelitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	an		Pelaporan Pajak Daerah		Penelitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
4.1.6	Penagihan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah Laporan Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah serta Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Penagihan Piutang Pajak Daerah	12 Laporan	243,875,200	Penagihan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah Laporan Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah serta Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Penagihan Piutang Pajak Daerah	12 Laporan	243,875,200	
4.1.7	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	189.242.800	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	189.242.800	
4.1.8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen dan 4 kali monitoring dan	369.421.200	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen dan 4 kali monitoring dan evaluasi	369.421.200	

				evalu asi							
					32.587.963.000					37.484.206.490	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menghasilkan usulan kebutuhan kegiatan. Hasil itu selanjutnya dibahas lagi dalam Musrenbang dengan stakeholder untuk mengevaluasi apakah usulan tersebut memang merupakan kegiatan yang benar-benar diperlukan di masyarakat. Stakeholder yang terlibat antara lain LSM, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi profesi, kelompok/forum informasi masyarakat, dan sebagainya. Peranan Badan Keuangan Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Badan Keuangan Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Kami berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kearifan. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, di mana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan. Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan buatan orang perorang ataupun kelompok Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah "ruh" ideologi akan memiliki "raga", keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata "berdaulat, mandiri dan berkepribadian" adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling

ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri;
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk

apapun. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibiayai oleh APBD, yang disusun melalui perencanaan anggaran terdiri dari sumber pendanaan dan penggunaan dana/anggaran. Sumber pendanaan berasal dari PAD, dana bagi hasil/perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk penerimaan pembiayaan. Sedangkan penggunaan dana terkonsep dalam konsep penganggaran terpadu (*unifield budgeting*) yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Efisiensi alokasi dana dan pencegahan terhadap duplikasi belanja dapat dilakukan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten Balangan yaitu :

“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”.

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Balangan maka di dalam RPJMD Kabupaten Balangan tertuang Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tujuannya adalah : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel.**

Sasarannya adalah :

Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan yaitu :

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi.

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target
disampaikan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan	%	87	87	88	89	90
		Indeks Pengelolaan Aset	%	40	42	45	48	52
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	6	6	7	7	8
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	%	8	8	9	9	10

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Program kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan akan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Badan Keuangan Daerah dalam tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang menunjang keberhasilan pencapaian Misi ke-4 Kepala Daerah yang tertuang dalam Kebijakan umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Program prioritas pada Tahun 2023 yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mencakup kumpulan kegiatan dan sub kegiatan riil, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pendukung sasaran RPJMD disampaikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3 (Tabel 33)

Program Kegiatan Prioritas Pendukung sasaran RPJMD

Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja (Outcome)	Target 2023	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target 2023	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6%	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bidang Layanan Pendataan dan Penetapan serta Bidang Penagihan dan Pelaporan

						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah	
						Evaluasi dan pengendalian Pajak Daerah	
	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8%		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8%	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan barang Milikdaerah	
						Penyusunan Standar Harga Penyusunan Perencanaan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

						Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban serta Bidang Perbendaharaan

						Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang anggaran	

		Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	Tepat Waktu			Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi terkait	
--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--

						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
		IPM Penatausahaan Keuangan	3%			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				IPM Penatausahaan Keuangan	3%	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	

						/Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	
						Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	

							Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
							Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	
							Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
							Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Balangan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023. Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2023 akan melaksanakan 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 351.658.073.642,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Adapun kegiatan-kegiatan utama/prioritas yang dilaksanakan BPKPAD Kabupaten Balangan antara lain :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

- d. Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - f. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - g. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - c. Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - d. Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- a. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - b. Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - d. Sub Kegiatan : Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - e. Sub Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - f. Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah.
 - a. Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
 - b. Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - c. Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - d. Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik
 - e. Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah
 - f. Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - g. Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - h. Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- i. Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - d. Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - e. Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - f. Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - g. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
 - h. Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - i. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adapun kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan BPKPAD Kabupaten Balangan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Untuk sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Balangan berasal dari APBD murni / APBD II Kabupaten Balangan Tahun Anggaran berkenaan.

Tabel 4.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pada tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

Kode	Urusan, Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN								
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	Kabupaten Balangan	BB	21,299,649,011	APBD	BPKPAD	BB	21,299,649,011
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Kabupaten Balangan	100%	239,682,400	APBD	BPKPAD	100%	239,682,400
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Kabupaten Balangan	100%	51,349,700	APBD	BPKPAD	100%	51,349,700
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase ketersediaan	Kabupaten	100%	115,080,100	APBD	BPKPAD	100%	115,080,100

|| Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 ||

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu	Balangan						
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Kabupaten Balangan	100%	73,252,600	APBD	BPKPAD	100%	73,252,600
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kabupaten Balangan	100%	14,388,297,642	APBD	BPKPAD	100%	14,388,297,642
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	13,738,181,342	APBD	BPKPAD	100%	13,738,181,342
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kabupaten Balangan	100%	130,985,800	APBD	BPKPAD	100%	130,985,800
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	65,125,500	APBD	BPKPAD	100%	65,125,500
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	100%	454,005,000	APBD	BPKPAD	100%	454,005,000

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	100%	2,574,175,200	APBD	BPKPAD	100%	2,574,175,200
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kabupaten Balangan	100%	133,863,000	APBD	BPKPAD	100%	133,863,000
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	100%	67,312,200	APBD	BPKPAD	100%	67,312,200
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	100%	2,373,000,000	APBD	BPKPAD	100%	2,373,000,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Kabupaten Balangan	100%	859,717,809	APBD	BPKPAD	100%	859,717,809
5.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Kabupaten Balangan	100%	92,394,100	APBD	BPKPAD	100%	92,394,100
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Kabupaten Balangan	100%	427,917,909	APBD	BPKPAD	100%	427,917,909
5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Kabupaten Balangan	100%	15,490,800	APBD	BPKPAD	100%	15,490,800

5.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan	Kabupaten Balangan	100%	31,500,000	APBD	BPKPAD	100%	31,500,000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	100%	292,415,000	APBD	BPKPAD	100%	292,415,000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	100%	289,710,000	APBD	BPKPAD	100%	289,710,000
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	100%	289,710,000	APBD	BPKPAD	100%	289,710,000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	12 bulan	896,689,000	APBD	BPKPAD	12 bulan	896,689,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	100%	329,768,000	APBD	BPKPAD	100%	329,768,000
5.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Balangan	12 bulan	137,921,000	APBD	BPKPAD	12 bulan	137,921,000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Kabupaten Balangan	100%	429,000,000	APBD	BPKPAD	100%	429,000,000

5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	12 bulan	2,051,376,960	APBD	BPKPAD	12 bulan	2,051,376,960
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	Kabupaten Balangan	100%	369,196,900	APBD	BPKPAD	100%	369,196,900
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor layak fungsi	Kabupaten Balangan	100%	669,440,000	APBD	BPKPAD	100%	669,440,000
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung kantor layak fungsi	Kabupaten Balangan	100%	1,012,740,060	APBD	BPKPAD	100%	1,012,740,060
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Balangan	87%	221,942,195,033	APBD	BPKPAD	87%	221,942,195,033
5.02.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	Kabupaten Balangan	100%	1,926,431,200	APBD	BPKPAD	100%	1,926,431,200
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	146,020,000	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	146,020,000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun sesuai ketentuan	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	144,770,000	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	144,770,000

5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi RKA SKPD dan RKA-P SKPD	Kabupaten Balangan	48 unit kerja	534,733,000	APBD	BPKPAD	48 unit kerja	534,733,000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan penyusunan dan review/asistensi DPA SKPD dan DPA-P SKPD	Kabupaten Balangan	48 unit kerja	36,860,000	APBD	BPKPAD	48 unit kerja	36,860,000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	323,800,000	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	323,800,000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	321,120,000	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	321,120,000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	419,128,200	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	419,128,200
5.02.02.2.02	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	% SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan	Kabupaten Balangan	100%	2,716,429,800	APBD	BPKPAD	100%	2,716,429,800
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Kas Daerah Kabupaten Balangan	Kabupaten Balangan	12 Dokumen	482,036,000	APBD	BPKPAD	12 Dokumen	482,036,000

5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Monev Dana Transfer ke Kabupaten Balangan	Kabupaten Balangan	12 Dokumen	54,382,400	APBD	BPKPAD	12 Dokumen	54,382,400
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Kabupaten Balangan		265,132,000	APBD	BPKAD		265,132,000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Kabupaten Balangan		334,824,000	APBD	BPKAD		334,824,000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan	Kabupaten Balangan	10.000 Dokumen	392,417,500	APBD	BPKPAD	10.000 Dokumen	392,417,500
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah regulasi penatausahaan keuangan daerah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	194,775,700	APBD	BPKPAD	1 Dokumen	194,775,700

	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kabupaten Balangan		992,862,200	APBD	BPKAD		992,862,200
5.02.02.2.03	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	% Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu	Kabupaten Balangan	100%	2,010,347,300	APBD	BPKPAD	100%	2,010,347,300
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Kabupaten Balangan		334,845,900	APBD	BPKPAD		334,845,900
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	134,900,900	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	134,900,900
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	105,033,100	APBD	BPKPAD	1 Dokumen	105,033,100
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	Jumlah Laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	237,353,700	APBD	BPKPAD	1 Dokumen	237,353,700

	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	271,049,400	APBD	BPKPAD	1 Dokumen	271,049,400
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	927,164,300	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	927,164,300
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kabupaten Balangan		215,288,986,733	APBD	BPKPAD		215,288,986,733
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Kabupaten Balangan		199,429,441,839	APBD	BPKPAD		199,429,441,839
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Kabupaten Balangan		14,500,000,000	APBD	BPKPAD		14,500,000,000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Kabupaten Balangan		1,359,544,894	APBD	BPKPAD		1,359,544,894
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Kabupaten Balangan	40	2,243,230,400	APBD	BPKPAD	40	2,243,230,400

5.02.03.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase aset tanah yang bersertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat 2. Persentase pemindah tanganan BMD yang selesai dilaksanakan 3. Persentase penyelesaian LBMD tahunan 4. Persentase RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting	Kabupaten Balangan	1. 6,44 % 2. 100% 3. 100% 4. 100%	2,243,230,400	APBD	BPKPAD	1. 6,44 % 2. 100% 3. 100% 4. 100%	2,243,230,400
5.02.03.2.01.01	penyusunan standar harga	Jumlah Dokumen SSH yang diterbitkan tepat waktu	Kabupaten Balangan	50 buku SSH 2024	238,774,800	APBD	BPKPAD	50 buku SSH 2024	238,774,800
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun sesuai kondisi eksisting	Kabupaten Balangan	31 Dokumen RKBMD	102,931,400	APBD	BPKPAD	31 Dokumen RKBMD	102,931,400
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Regulasi dan Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Penatausahaan & Pemanfaatan BMD	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	139,136,200	APBD	BPKPAD	2 Dokumen	139,136,200
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik	Jumlah Dokumen terkait inventarisasi barang milik daerah	Kabupaten Balangan	3 Dokumen	108,460,100	APBD	BPKPAD	3 Dokumen	108,460,100

5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah yang diajukan pendaftaran sertifikat	Kabupaten Balangan	50 Persil Tanah	386,150,500	APBD	BPKPAD	50 Persil Tanah	386,150,500
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan bermotor yang telah membayar pajak	Kabupaten Balangan	800 kendaraan bermotor	49,641,500	APBD	BPKPAD	800 kendaraan bermotor	49,641,500
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Proses pemindah tanganan BMD yang sesuai regulasi 2. Jumlah BMD yang dapat dipindah tangankan	Kabupaten Balangan	1. 10 Kegiatan 2. 100 item	265,358,200	APBD	BPKPAD	1. 10 Kegiatan 2. 100 item	265,358,200
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Dokumen LBMD yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah Dokumen rekonsiliasi bulanan aset dan persediaan dengan SKPD	Kabupaten Balangan	1. 62 buku 2. 720 dokumen	856,966,000	APBD	BPKPAD	1. 62 buku 2. 720 dokumen	856,966,000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan BMD	Kabupaten Balangan	80 orang	95,811,700	APBD	BPKPAD	80 orang	95,811,700
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	Kabupaten Balangan	100%	2,311,126,600	APBD	BPKPAD	100%	2,311,126,600

5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kabupaten Balangan	100%	2,311,126,600	APBD	BPKPAD	100%	2,311,126,600
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Balangan	2 dokumen	288,761,800	APBD	BPKPAD	2 dokumen	288,761,800
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah SDM Aparatur Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Mengikuti Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Balangan	30 Orang	225,381,800	APBD	BPKPAD	30 Orang	225,381,800
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek pajak yang didata dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan	Kabupaten Balangan	1000 Objek Pajak	285,280,500	APBD	BPKPAD	1000 Objek Pajak	285,280,500
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah sistem informasi tentang PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten Balangan	2 sistem informasi	214,859,900	APBD	BPKPAD	2 sistem informasi	214,859,900
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah SPTPD dan SSPD yang diterbitkan	Kabupaten Balangan	3000 SPTPD dan 3000 SSPD	402,976,400	APBD	BPKPAD	3000 SPTPD dan 3000 SSPD	402,976,400
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Rekap Laporan Penelitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Balangan	12 Laporan	91,327,000	APBD	BPKPAD	12 Laporan	91,327,000

5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah serta Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Penagihan Piutang Pajak Daerah	Kabupaten Balangan	12 Laporan	243,875,200	APBD	BPKPAD	12 Laporan	243,875,200
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Balangan	12 Dokumen	189,242,800	APBD	BPKPAD	12 Dokumen	189,242,800
05.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Balangan	4 Dokumen dan 4 kali monitoring dan evaluasi	369,421,200	APBD	BPKPAD	4 Dokumen dan 4 kali monitoring dan evaluasi	369,421,200
TOTAL PAGU ANGGARAN					247,796,201,044				247,796,201,044

BAB V

PENUTUP

Tersusunnya rencana kerja tahun 2023 ini selanjutnya diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan. Diseminasi Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan yang direncanakan akan terlaksana secara tertib, terarah, dan terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan-tujuan strategis.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan 2023 ini, semua kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan diharapkan akan mengacu pada Renja yang telah disepakati bersama. Sehingga dapat mencapai tujuan organisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah guna menunjang pembangunan di Kabupaten Balangan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Paringin, 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Balangan,



FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
NIP. 19780601 200501 1 016